

KERJASAMA PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN NARKOBA DI NIGERIA

Komang Tri Laksmi,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: amylaksmi@gmail.com,

ABSTRACT

Drug trafficking is a transnational crime that is now threatening global security. Drug trafficking through Nigeria poses new challenges and exposes various threats to the United States Government. Efforts are being made by the Government of the United States to combat drug trafficking in Nigeria through the creation of West Africa Cooperative Security Initiative (WACSI) in 2011. Bilateral cooperation undertaken by the Government of the United States and Nigeria involved agencies such as the DEA, DOD, AFRICOM, and the Nigeria Police Force. This research is aimed to describe the cooperation undertaken by the United States government and Nigeria in the fight against drugs through the enforcement of WACSI. The concept used in this study is the concept of Transnational Organized Crime and Bilateral Cooperation.

Keywords: Transnational Organized Crime, Bilateral Cooperation, WACSI, DEA

1. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang kini dapat mengancam stabilitas keamanan suatu negara adalah perdagangan narkoba. Perdagangan narkoba dalam perkembangannya tidak hanya terjadi secara domestik tetapi juga secara transnasional. Perdagangan narkoba secara transnasional yang dimaksudkan adalah melewati batas-batas negara sehingga dapat berkembang secara internasional (Finckenauer, 2000). Tidak hanya itu, kelompok yang terlibat dalam perdagangan narkoba cenderung melakukan tindakan kriminal lainnya seperti kekerasan, pembunuhan massal dan penyelundupan manusia (Hanken, 2011). Perkembangan teknologi dan informasi pada era modern memberikan kemudahan terhadap pelaku kejahatan untuk melakukan mobilisasi narkoba secara transnasional. Hal inilah yang menjadi faktor utama sindikat narkoba dapat secara mudah untuk memasuki wilayah tertentu. Kelompok kriminal ini terstruktur dengan baik, sehingga sindikat ini sangat sulit untuk diatasi.

Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satunya dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* (1961). Konvensi tersebut menjelaskan mengenai upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat

narkoba adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang pengguna. Negara-negara di dunia yang memiliki masalah serius mengenai perdagangan narkoba berada di wilayah Amerika Latin, Asia Tengah dan juga Afrika Barat (Wylar & Cook, 2009). Jika Amerika Latin dan Asia Tengah lebih dikenal sebagai wilayah produsen narkoba, maka wilayah Afrika Barat lebih dikenal sebagai wilayah produsen dan distributor narkoba.

Salah satu sindikat narkoba di Afrika Barat yang memiliki peranan penting dalam jaringan narkoba internasional adalah sindikat narkoba asal Nigeria (Wylar & Cook, 2009). Berdasarkan data yang dikutip dari *United Nations Office on Drugs and Crime* dalam *Cocaine trafficking in West Africa: The threat to stability and development* (2007), diketahui bahwa angka penyelundupan narkoba di Nigeria menduduki posisi kedua terbesar setelah Guenia Bissau. Data yang dimaksud tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah penyelundupan narkoba di Afrika Barat

Nama Negara	Jumlah Penyelundupan Narkoba Tahun 2006	Jumlah Penyelundupan Narkoba Tahun 2007
Nigeria	235 kg (2,35 kwintal)	259 kg (2,59 kwintal)
Benin	61 kg (6,1 kwintal)	59 kg (5,9 kwintal)

Cape Verde	42 kg (4,2 kwintal)	35 kg (3,5 kwintal)
Gueinea Bissau	674 kg (6,74 kwintal)	635 kg (6,35 kwintal)

Sumber: *United Nations Office on Drugs and Crime* (2007)

Data dari UNODC (2004) menyebutkan bahwa jumlah kokain yang diselundupkan dari Nigeria sebesar 235kg (2,35 kwintal) pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 259kg (2,59 kwintal) pada tahun 2007. Walaupun dalam kurun waktu 2006-2007 penyelundupan narkoba di wilayah-wilayah Afrika Barat seperti wilayah Benin dan Cape Verde terjadi penurunan yang signifikan, namun pada September 2006, 26% kokain disita berasal dari Nigeria. Persentase ini meningkat dua kali lipat yaitu sebesar 46% dalam jangka waktu setahun yaitu 2006-2007. Nigeria merupakan salah satu negara di Afrika Barat yang memiliki masalah serius dengan perdagangan narkoba. Sejak tahun 1990an, Nigeria menjadi jalur atau negara transit perdagangan narkoba internasional (Heibutzki, R, nd). Pada tahun 2006, kepolisian Nigeria menemukan sekitar 14,2 ton semen yang dicampurkan dengan kokain (United Nations on Drugs and Crime, 2008). Pasca tahun 2000an peran sindikat kriminal dalam aktifitas perdagangan narkoba di Nigeria semakin signifikan. Sindikat ini menyuplai narkoba dalam jumlah besar dengan kisaran harga yang rendah yaitu 20 naira (15 cents USD) untuk satu linting ganja, 20-50 naira (15-35 cents USD) untuk heroin dan 80-100 naira (60-75 cents USD) untuk kokain (The Economist, 2007). Permasalahan narkoba di Nigeria diperparah dengan sindikat kriminal Nigeria yang juga terlibat dalam kasus korupsi, pencucian uang, dan penipuan yang merugikan negara (Hanken, 2011).

Tercatat sindikat narkoba asal Nigeria mendominasi sekitar 25-30 persen dari penyelundupan heroin ke Amerika Serikat (Liddick, 2004). Menurut DEA (2010), 80% penyelundupan methamphetamine yang dikirimkan ke Amerika Serikat diperdagangkan oleh kartel narkoba asal Nigeria. Jumlah penyelundupan tersebut meningkat setiap tahunnya.

Pertumbuhan perdagangan narkoba melalui Nigeria menimbulkan tantangan baru serta memunculkan berbagai ancaman bagi Pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mulai melakukan kerjasama dengan Nigeria dalam menanggulangi perdagangan narkoba tahun 2009 melalui

West Africa Cooperative Security Initiative (WACSI). Presiden Amerika Barack Obama melalui *President Determination No. 2008-28* yang dikeluarkan pada 15 September 2008 menyatakan bahwa Pemerintah Amerika Serikat memprioritaskan wilayah Nigeria karena merupakan satu-satunya negara di Afrika Barat yang termasuk dalam daftar negara-negara yang dianggap sebagai produsen ataupun jalur transit perdagangan narkoba terbesar (United States Departement of States, 2008).

Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan dana sebesar USD 60 juta per tahun ke Nigeria. WACSI diharapkan mampu menurunkan angka perdagangan narkoba di wilayah Nigeria. Pada tahun 2009, Pemerintah Amerika Serikat melalui *Departement of Defense (DOD)* bahkan memberikan bantuan dana sebesar USD 1 juta untuk menanggulangi perdagangan narkoba di Nigeria (Wayler dan Cook, 2009). Jumlah dari keseluruhan bantuan dana ini merupakan bantuan dana terbesar yang diperoleh Nigeria melalui WACSI.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam tulisan ini sebagian besar mengambil tema-tema yang berkaitan dengan *US Foreign Policy*, dan pemberantasan narkoba internasional. Judul-judul artikel tersebut antara lain *The Foreign Economic Effect of The US War on Drugs* karya Fred E. Foldvary (2013), dan *Mexico and the United States: Neighbors Confront Drug Trafficking* oleh Joseph R. Fuentes tahun 2007.

Tulisan pertama ditulis oleh Fred E. Foldvary dengan judul *The Foreign Economic Effect of The US War on Drugs* (2013). Tulisan Foldvary (2013) mengulas tentang beragam kerjasama pemberantasan narkoba oleh Amerika Serikat dengan negara lainnya di dunia seperti Colombia, Peru, Mexico, Guatemala, Portugal, dan Afganistan. Foldvary (2013) menawarkan model pasar terbatas bagi narkoba seperti yang diterapkan di Portugal dan Guatemala. Hal tersebut menurutnya akan mengurangi peran kartel. Namun, aspek kepastian hukum harus dilakukan terlebih dahulu jika ingin menerapkan langkah ini. Kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan cara mengurangi penawaran narkoba dinilai berhasil, karena dapat menekan produksidan perdagangan narkoba di Mexico. Foldvary (2013) juga mengulas mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari

semakin meluasnya kartel narkoba di dunia. Peran kartel tersebut kini meluas hingga dapat mempengaruhi pemerintahan dari wilayah tertentu. Wilayah dengan sistem peradilan yang lemah menyebabkan kartel narkoba kian mendominasi. Berbagai tindak kekerasan dilakukan untuk memperlancar bisnis perdagangan narkoba. Tulisan Foldvary (2013) menyarankan diperlukan adanya kerjasama internasional agar dapat meminimalisir peran kartel dan perdagangan narkoba. Tulisan Foldvary (2013) mengulas mengenai upaya-upaya dari kerjasama lainnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam penanggulangan narkoba melalui kerjasama militer. Kerjasama militer dilakukan guna memperkuat institusi pemerintahan di negara-negara tersebut yang bertujuan untuk memperlemah mobilisasi perdagangan narkoba. Kerjasama militer digunakan dalam upaya memonitoring kawasan perairan agar mengurangi penyelundupan narkoba

Penelitian Foldvary (2013) dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti mengenai model pasar terbatas dalam penanggulangan narkoba. Penelitian penulis, Amerika Serikat menerapkan strategi pasar terbatas untuk menekan produksi dan distribusi narkoba yang masuk ke Amerika Serikat melalui Nigeria. Strategi ini diterapkan untuk mencegah munculnya pabrik-pabrik baru yang mengelola obat-obatan terlarang dan mengurangi peran sindikat narkoba di wilayah Nigeria dan Amerika Serikat. Namun, perbedaan mendasar penelitian penulis dengan Foldvary (2013) bahwa penelitian penulis tidak terfokus dalam penggunaan pelatihan militer dalam upaya penanggulangan narkoba.

Tulisan kedua adalah dengan judul *Mexico and the United States: Neighbors Confront Drug Trafficking* oleh Joseph R. Fuentes tahun 2007. Tulisan Fuentes (2007) memaparkan mengenai kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam penanggulangan narkoba di Meksiko. Meksiko merupakan negara dengan jumlah pengedar narkoba terbesar ke Amerika Serikat. Berbagai cara digunakan oleh pengedar narkoba agar barang-barang terlarang tersebut dapat memasuki perbatasan Amerika Serikat, seperti dengan menyimpan kokain di dalam ban mobil penumpang. Langkah lainnya yang dilakukan oleh pengedar narkoba asal Meksiko adalah dengan cara menyelundupkan obat-obat terlarang ke Amerika Serikat menggunakan pesawat berkecepatan tinggi dan kapal kargo. Upaya-upaya tersebut berhasil dilakukan oleh karena peningkatan pendapatan yang

diperoleh pengedar. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberantasan narkoba di Meksiko melalui *Drug Enforcement Administration (DEA)*. Tulisan Fuentes (2007) menyebutkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat melibatkan lembaga-lembaga seperti *the Departments of Justice, Departement of Defense, Departement of State, Department of Treasury, and Departement of Transportation* dalam upaya penanggulangan narkoba di Meksiko. Bantuan dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat adalah sekitar USD 1.5 miliar semenjak tahun 2000 (U.S. Department of State, 2000). Sehubungan dengan pengawasan obat-obatan terlarang, Amerika Serikat mengalokasikan dana sebesar USD 18.5 miliar. Upaya lainnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat seperti pelatihan penegakan hukum, kampanye media anti-narkoba, pengobatan dan penelitian mengenai pencegahan narkoba dan program penyuluhan mengenai penyalahgunaan zat. Tulisan Fuentes (2007) dapat menjadi acuan bagi peneliti yaitu sama-sama memberikan bantuan dalam bentuk dana, namun alokasi dari pemberian dana tersebut berbeda. Penelitian penulis mengulas mengenai kebijakan Amerika Serikat dalam mengalokasikan dana yang diberikan untuk upaya program penyuluhan anti narkoba serta dalam upaya memperkuat unit polisi Afrika. Namun, penelitian Fuentes (2007) memiliki fokus utama yaitu pelatihan dalam penegakan hukum dan bantuan dana yang dialokasikan terhadap program-program yang mendukung upaya Amerika Serikat dalam menanggulangi narkoba di Meksiko seperti biaya untuk penelitian dan kampanye anti narkoba.

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah konsep atau suatu hubungan yang berkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya mengenai masalah yang ingin diteliti. Konsep juga merupakan suatu generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ada (Mardalis, 2002). Konsep yang digunakan dalam tulisan ini meliputi, konsep *transnational organized crime*, konsep kerjasama bilateral dan konsep implementasi kerjasama untuk menjelaskan implementasi kerjasama Pemerintah Amerika Serikat dalam upaya penanggulangan narkoba di Nigeria.

1. Konsep Transnational Organized Crime.

Definisi *Transnational Organized Crime* (TOC) oleh UNODC dalam laporannya yang berjudul *The Globalization of Crime: a Transnational Organized Crime Threat Assessment* tahun 2010 menyebutkan bahwa TOC merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan secara berkelompok dan memiliki jaringan yang luas agar mempermudah akses ke negara tujuan. Organisasi kejahatan lintas batas negara membentuk kelompok yang mempunyai jaringan luas di negara lain. Kejahatan yang dihasilkan tidak hanya dilakukan di satu negara, namun juga memiliki dampak yang serius di negara lainnya. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan transnasional antara lain globalisasi, migrasi, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat (Kemlu, 2013). Kejahatan lintas batas negara kini telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pendapat yang dikemukakan oleh M. Cherif Bassiouni (1986) penulis buku *International Criminal Law*, menyebutkan bahwa kejahatan transnasional adalah suatu tindak pidana internasional yang mengandung tiga unsur yakni unsur internasional, unsur transnasional dan unsur kebutuhan.

Kejahatan transnasional dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti perdagangan narkoba, perdagangan perdagangan senjata api, bahkan perdagangan manusia. Kejahatan transnasional dapat menghancurkan instansi dan lembaga pemerintah, memicu korupsi, dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Sifat transnasional dari kejahatan terorganisir tersebut berarti bahwa jaringan kriminal membentuk ikatan lintas batas negara. Jaringan tersebut tidak berjalan dengan stagnan, namun muncul sebagai jaringan kriminal yang lebih fleksibel dan lebih canggih dengan jangkauan yang semakin luas di seluruh dunia (National Institute of Justice, n.d).

Menurut UNODC (2010) adapun upaya yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk penanggulangan TOC adalah melalui:

1. Penguatan institusi dan hukum
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam hal penyelidikan dan peradilan
3. Meningkatkan kapasitas negara yaitu melalui program pelatihan
4. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis berbagai informasi
5. Memperkuat jaringan kerjasama lintas batas.

Penelitian ini menggunakan konsep TOC untuk menganalisis mengenai perdagangan narkoba yang mulai mengancam stabilitas keamanan suatu negara. Pelaku atau sindikat narkoba tidak hanya terlibat dalam perdagangan narkoba, namun juga tindakan kejahatan lainnya seperti perdagangan manusia, pencucian uang dan lain sebagainya. Suatu negara yang tidak memiliki penegakan hukum yang kuat, maka pelaku kejahatan tersebut akan mudah untuk mobilisasi perdagangan narkoba dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Hal ini akan menjadi ancaman bagi negara tujuan, khususnya dalam kejahatan perdagangan narkoba.

Berdasarkan laporan dari UNODC Word Drugs Report (2011), upaya pengawasan narkoba oleh negara-negara di dunia telah dapat mengendalikan peredaran narkoba di Eropa, Amerika Serikat dan Asia. Namun demikian, transaksi perdagangan narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir terus meningkat, sehingga dibutuhkan berbagai macam upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara yaitu melalui kerjasama.

2. Kerjasama Bilateral

Kerjasama diartikan sebagai bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dunia. Kerjasama internasional meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan dan ekonomi yang mengacu kepada politik luar negeri suatu negara. Kerjasama akan terjadi apabila ada keterlibatan dua negara ataupun lebih dalam operasi bersama dalam upaya menanggulangi suatu permasalahan (Jack&Roy,1969). Bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu dengan mengkoordinasikan kebijakan, membentuk suatu organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk mewadahi segala permasalahan yang berkaitan dengan kedua negara atau lebih. Bentuk-bentuk kerjasama antar negara dapat digolongkan seperti kerjasama bilateral, kerjasama multilateral dan kerjasama regional atau kawasan (Yusuf, 1989). Penelitian ini akan memfokuskan pada kerjasama bilateral yang dibangun oleh Amerika Serikat dalam upaya penanggulangan sindikat narkoba di Nigeria.

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama yang terjalin dapat berupa kerjasama dalam bidang politik, sosial, ekonomi, atau kerjasama mengenai

keamanan. Menurut Peter Toma dan Gorman (1991) salah satu tujuan dari suatu negara melakukan kerjasama yaitu untuk memelihara perdamaian yang diharapkan mampu menghilangkan dampak negatif yang timbul oleh aktivitas manusia yaitu seperti terorisme dan kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba. Dua negara memutuskan untuk bekerjasama karena kedua negara menganggap bahwa melalui kerjasama dapat meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan, baik dalam bidang ekonomi maupun keamanan. Hal inilah kemudian menjadi dasar Amerika Serikat ingin melakukan kerjasama bilateral untuk penanggulangan narkoba di Nigeria guna menjaga perdamaian dunia.

Presiden Barack Obama dalam *Strategy to Combat Transnational Organized Crime: Letter from the President* (National Security Council, 2011) menyatakan bahwa:

During the past 15 years, technological innovation and globalization have proven to be an overwhelming force for good. However, transnational criminal organizations have taken advantage of our increasingly interconnected world to expand their illicit enterprises. Criminal networks are not only expanding their operations, but they are also diversifying their activities, resulting in a convergence of transnational threats that has evolved to become more complex, volatile, and destabilizing

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan kemudahan terhadap organisasi kejahatan transnasional karena dapat dengan mudah memperluas usaha illegal mereka. Ini menyebabkan kejahatan transnasional kini telah berkembang secara kompleks. Kerjasama internasional merupakan salah satu jalan keluar yang akan diambil, baik secara bilateral maupun multilateral.

Menurut *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* pada artikel 9 bahwa kerjasama internasional dilakukan oleh setiap negara baik dalam bentuk kerjasama bilateral atau multilateral dalam upaya penanggulangan sindikat narkoba. Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Nigeria berfokus pada upaya meningkatkan efektifitas penanggulangan narkoba melalui wadah WACSI.

Kerjasama dapat diimplementasi melalui suatu proses atau serangkaian

keputusan dan tindakan negara yang diarahkan untuk menjalankan suatu mandat yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi kerjasama oleh suatu negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. UNODC (2010) mengidentifikasi bahwa implementasi merupakan suatu aktifitas yang bertujuan untuk mengaplikasikan sebuah program. Kerjasama dalam upaya penanggulangan narkoba dapat diimplementasikan dengan berbagai cara. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh suatu negara dengan cara pemberian bantuan dana, program pelatihan, penegakan hukum, kampanye anti narkoba dan penelitian mengenai pencegahan narkoba. Implementasi kerjasama tersebut nantinya direalisasikan melalui program-program yang dibentuk oleh suatu negara dalam upaya menanggulangi suatu permasalahan.

Adapun pilar-pilar yang dapat diwujudkan dalam merealisasikan sebuah kerjasama dan program menurut UNODC (2010):

1. Pemberian bantuan. Bantuan yang dimaksud dapat berupa bantuan dana ataupun bantuan fisik atau infrastruktur seperti; pelatihan unit kepolisian atau militer, pemberian senjata, atau memberikan sebuah gagasan. Program bantuan ini direalisasikan untuk membentuk program-program yang nantinya dijalankan oleh dua negara atau lebih dalam menanggulangi suatu permasalahan.
2. Pembentukan program. Pembentukan program-program merupakan hal yang dilakukan oleh suatu negara sebelum membuat kebijakan. Program ini dibentuk atas dasar kesepakatan kedua negara atau lebih.
3. Aplikasi. Setelah program terbentuk, maka program-program diaplikasikan dan direalisasikan sesuai dengan tujuan dari masing-masing program. Program-program tersebut diawasi langsung oleh badan-badan berwenang yang sudah diberikan mandat oleh negara.
4. Peninjauan. Pilar yang keempat ini bertujuan untuk melihat sejauh mana program tersebut sudah berjalan dan menilai mengenai kekurangan atau kelebihan dari masing-masing program dan kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara.

Terkait dengan keempat pilar diatas, kerjasama Amerika Serikat dan Nigeria dalam

upaya penanggulangan sindikat narkoba dengan mengoperasikan program melalui *West Africa Cooperative Security Initiative* (WACSI). Lembaga-lembaga seperti *Department of Defense* (DOD), *DEA*, *The Department of the Treasury*, AFRICOM dan *Nigeria Police Force* (NPF) yang merencanakan program-program yang berjalan dalam upaya penanggulangan perdagangan narkoba di Nigeria.

3. METODELOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk menggambarkan mengenai kerjasama Pemerintah Amerika Serikat dalam upaya penanggulangan narkoba di Nigeria. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku dan literatur terkait dengan penelitian ini seperti laporan penelitian, web resmi, tesis, skripsi dan jurnal serta buku referensi dan data-data pendukung lainnya di berbagai *website* yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah kajian pustaka yaitu dengan cara pengumpulan data dengan mengumpulkan sejumlah literatur seperti laporan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1 Perdagangan narkoba di Nigeria

Nigeria merupakan wilayah yang menjadi jalur utama perdagangan narkoba di Afrika Barat. Heroin yang berasal dari Afganistan dan kokain yang berasal dari Amerika Selatan transit di Nigeria sebelum dibawa ke Amerika Serikat dan Eropa. Heroin yang berasal dari Nigeria membawa dampak yang signifikan terhadap stabilitas keamanan Amerika Serikat. Terkait dengan hal tersebut, UNODC (2014) menyatakan bahwa perdagangan narkoba menjadi suatu bentuk bisnis yang paling menguntungkan bagi pelaku kejahatan khususnya sindikat narkoba. Perdagangan narkoba dianggap sebagai kegiatan yang dapat membawa keuntungan besar. Nigeria merupakan wilayah dengan tingkat produsen dan distributor cukup besar. Salah satu obat-obatan terlarang di Nigeria yang dibudidayakan dengan jumlah besar adalah *Cannabis sativa* (ganja) dan opium (heroin). Ganja dan heroin merupakan jenis obat terlarang yang paling umum yang diekspor ke negara tetangga di Afrika Barat, Eropa dan Amerika Serikat.

Tabel 3. Jumlah pengguna Narkoba di Nigeria yang berumur 15-64 tahun (data dalam bentuk persen)

	Cocaine	Opioids	Cannabis
2007	0.5	0.6	13.8
2009	0.5	0.6	13.8
2011	0.5	0.7 (0.3-1.0)	14.3 (11.8-16.8)
2012	0.7 (0.3-1.1)	0.7 (0.3-1.0)	14.3 (11.8-16.8)
2013	0.7 (0.3-1.1)	0.7 (0.3-1.0)	14.3 (11.8-16.8)

Sumber: *Global Drug Policy Observatory* (2013)

Data diatas menunjukkan bahwa Nigeria merupakan salah satu wilayah dengan pengguna narkoba terbesar di Afrika. Terjadi peningkatan terhadap pengguna narkoba pada usia dewasa dari tahun 2011 hingga 2013 baik dalam konsumsi kokain maupun ganja. 3,7% dari jumlah warga Nigeria yang berusia 15-64 tahun menggunakan narkoba dan alcohol pada kehidupan sehari-hari mereka. Pembuatan *methamphetamine* di Nigeria sekitar 64% akan diperdagangkan ke wilayah Amerika Serikat (*Global Drug Policy Observatory, 2013*) Sebagian besar pengiriman narkoba tersebut akan dikirim lewat pelabuhan. DOD berperan penting dalam upaya penanggulangan narkoba di kawasan Nigeria ini, melalui program pengawasan dan deteksi di wilayah bandara dan pelabuhan.

4.1.2 Nigeria Sebagai Wilayah Transit

Sejak tahun 1990an, Nigeria merupakan wilayah yang terlibat dalam perdagangan narkoba internasional yaitu sebagai wilayah transit. *International Narcotic on Board* (2012) mengatakan bahwa Nigeria hingga saat ini masih menjadi negara transit terbesar untuk obat-obatan terlarang yang diperdagangkan ke Amerika Serikat dan pasar Eropa. Penegakan hukum dan peradilan yang lemah membuat mudahnya mobilisasi perdagangan narkoba di wilayah tersebut. Hal tersebutlah yang kemudian memberi keuntungan terhadap sindikat-sindikat narkoba untuk menguasai wilayah Nigeria dengan mudah. Sebagian besar obat-obatan terlarang yang sering ditemukan di Nigeria adalah *cannabis*, kokain, heroin dan *methamphetamine*. Perdagangan kokain di Nigeria diperkirakan menghasilkan keuntungan hampir USD 900 juta setiap tahunnya.

Amerika Serikat merupakan target utama penjualan narkoba oleh sindikat-sindikat narkoba di seluruh dunia (DEA, 2010).

Amerika Serikat dianggap sebagai pasar narkoba terbesar oleh organisasi perdagangan narkoba. Selain itu, Amerika Serikat juga merupakan negara dengan tingkat konsumsi narkoba mencapai 42,4%. Angka tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan negara-negara lainnya di dunia (Nazario, 2008). Sindikat narkoba kini memanfaatkan wilayah-wilayah dengan penegakan hukum lemah untuk melakukan transit kemudian mendistribusikan narkoba. Nigeria merupakan salah satu wilayah yang banyak dilirik oleh para sindikat narkoba di dunia sebagai wilayah transit. Selain penegakan hukum yang lemah, Nigeria juga memiliki tingkat keamanan yang rendah. Sehingga pelaku sindikat narkoba mudah untuk melakukan mobilisasi perdagangan narkoba.

4.1.3 Nigeria Sebagai Produsen dan Distributor Narkoba.

Seperti yang dijelaskan diatas, Nigeria tidak hanya menjadi wilayah transit, namun juga sebagai produsen dan distributor narkoba. Masalah yang kini marak terjadi di Nigeria adalah meningkatnya jumlah pabrik yang memproduksi obat-obatan terlarang jenis metamphetamie (shabu) dan heroin. Jenis metamphetamie merupakan jenis obat yang berwarna putih, tidak berbau, dan pahit. Obat ini mudah larut dalam air dan alkohol, dapat digunakan dengan cara merokok atau dihirup (Oseghale,2013). Jenis metamphetamie menjadi populer di kalangan pengguna narkoba di Nigeria untuk kapasitas meningkatkan kinerja seksual dan penghilang rasa sakit.

Aliran obat-obatan terlarang, methamphetamine dan heroin sebagian besar diarahkan ke negara-negara Asia, Amerika Serikat dan Eropa. Sebelumnya pada tahun 2005, UNODC telah memberikan suatu peringatan keras terhadap pabrik shabu ilegal di Nigeria. Menurut laporan yang diterbitkan oleh NDLEA pada tahun 2011 bahwa terjadi peningkatan dalam permintaan obat-obatan terlarang dari Asia dan Amerika Serikat.

Tingginya jumlah permintaan obat-obatan terlarang, membuat semakin gencar pabrik obat-obatan terlarang di Nigeria memproduksi barang. Sindikat narkoba mulai memperluas jaringan mereka untuk mempermudah dalam menyebarkan narkoba dan memasukkan produksi shabu ke negara yang dituju. Pada tahun 2011 ditemukan lima pabrik shabu di Nigeria. Empat pabrik ilegal ditemukan di Lagos dan satu pabrik ditemukan di Anambra (NDLEA,2011). Semua pabrik shabu di Lagos berlokasi di daerah yang

berkembang. Sedangkan pabrik shabu di Nnewi, menggunakan sebuah apartement bawah tanah di rumah salah satu keluarga pelaku yang dijadikan sebagai sebuah lab. Pabrik-pabrik shabu yang berada di Nigeria ini memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan dan kesehatan (Oseghale,2013). Gas yang dilepaskan oleh produksi shabu dapat menyebabkan keracunan dan dapat menyebabkan kanker kulit apabila terkena kulit manusia.

Methamphetamine (shabu) yang dihasilkan oleh Nigeria sangat menguntungkan untuk bisnis perdagangan narkoba. Methamphetamine dijual dengan harga \$200,000 per kg. *Drug Enforcement Administration* (DEA) melaporkan bahwa Nigeria merupakan negara asal terbesar dalam pengiriman Methamphetamine ke wilayah Asia dan Amerika Serikat (US Senate,2013). Pada Juni 2011 ditemukan bahwa labolatorium methamphetamine di Nigeria menghasilkan sekitar 200 kg per minggu. Berikut adalah gambar dari labolatorium methamphetamine di Lagos, Nigeria, pada Juli 2011 dengan kapasitas produksi 150-200 kg per minggu.

Nigeria memiliki reputasi yang sangat buruk oleh badan pengawasan narkoba internasional. Selama bertahun-tahun Nigeria dikenal sebagai tempat transit untuk obat-obatan terlarang menuju Amerika Serikat dan Eropa (African Narco News, 2013). Namun, kini Nigeria memperluas perannya dalam perdagangan narkoba internasional yaitu sebagai kurir dan distributor. Jangkauan sindikat narkoba asal Nigeria sangatlah luas. 40% heroin dan kokain yang memasuki Amerika Serikat diperkirakan berasal dari Nigeria (African narco news,2013).

4.1.4 Dampak Terhadap Keamanan Amerika Serikat.

Produksi, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba sangat marak terjadi di Amerika Serikat. Jenis narkoba yang biasanya disalahgunakan ialah methamphetamine, heroin dan kokain. Methamphetamine banyak tersebar di wilayah Georgia dan Florida. US Drug Enforcement Agency (2004) memperkirakan bahwa sekitar 65% methamphetamine ini diperdagangkan oleh kartel narkoba asal Nigeria. Masuknya organisasi kriminal Nigeria ke Amerika Serikat membuat bertambahnya penyediaan obat-obatan terlarang jenis ini. DEA (2008) melaporkan bahwa terjadi peningkatan pada jumlah penyitaan methamphetamine di Amerika Serikat dari tahun 2001-2008. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar

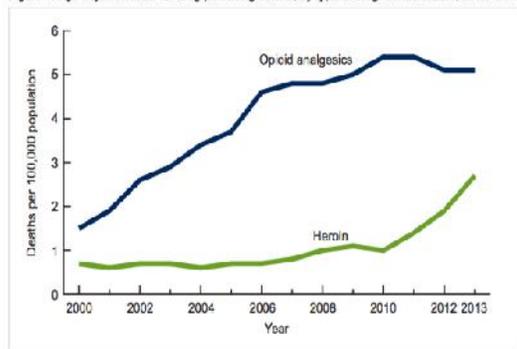
40,1%. Jumlah tersebut merupakan angka terbesar yang diperoleh oleh DEA dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain methamphetamine, jenis obat-obatan terlarang lainnya yang banyak tersebar di Amerika Serikat adalah kokain. Perbatasan Amerika Serikat merupakan titik utama masuknya pengiriman kokain yang diselundupkan ke Amerika Serikat. Menurut penilaian dari intelijen Amerika Serikat bahwa sekitar 65% kokain yang diselundupkan ke Amerika Serikat melintasi perbatasan Southwest. Kokain sudah tersedia di seluruh kota besar di Amerika Serikat. Sekitar 45% kokain yang tersedia di Amerika Serikat disebar oleh kartel yang berasal dari Nigeria (US Drug Enforcement Agency, 2004).

Kerjasama bilateral antara Amerika Serikat dan Nigeria terfokus terhadap upaya penanggulangan narkoba. Semenjak tahun 2003 kasus perdagangan narkoba di Amerika Serikat terus meningkat. Jenis narkoba yang paling sering ditemukan adalah Methamphetamine, kokain, dan heroin.

Grafik 1. Jumlah Kematian akibat heroin dan kokain di Amerika Serikat.

Figure 1. Age-adjusted rates for drug-poisoning deaths, by type of drug, United States, 2000–2013



Source: CDC/NCHS, *National Vital Statistics System, Mortality* (2013)

Laporan terbaru dari Pusat Statistik Kesehatan Nasional Amerika Serikat menunjukkan bahwa kematian akibat heroin pada tahun 2010-2013 meningkat empat kali lipat. Jumlah tersebut meningkat sebesar 0,7 kematian per 100.000 penduduk menjadi 2,7 kematian per 100.000 penduduk. Jumlah ini meningkat di segala usia dan lebih banyak pada kaum laki-laki (NCHS,2015). Jumlah pengguna obat-obatan ini meningkat 17% menjadi 37% dari tahun 2000-2010 (Hendrik,2015). Jumlah ketergantungan pada pengguna narkoba juga meningkat pada tahun 2011-2013 hingga 40%.

Selain mengalami ketergantungan, perdagangan narkoba yang meluas di Amerika Serikat juga menyebabkan meningkatnya tingkat kriminal kekerasan dan pembunuhan.

Berbagai tindak kriminal yang terjadi di Amerika Serikat, sebagian besar memiliki keterkaitan dengan aktivitas perdagangan narkoba. Tindak kriminal terjadi antar kartel narkoba yang ingin menguasai wilayah tertentu. Kekerasan yang dilakukan oleh indikat narkoba terus meningkat pasca tahun 2009 (DEA, 2011). Berbagai tindak kriminal terkait perdagangan narkoba terus terjadi karena sindikat-sindikat narkoba ingin bersaing untuk mengembangkan wilayah operasional dan mengembangkan bisnis mereka. Seperti yang disebutkan dalam *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* pada tahun 1988 bahwa berbagai tindakan kekerasan terkait perdagangan narkoba dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional.

4.2 Hasil Temuan

4.2.1 Respon Pemerintah AS dalam upaya Penanggulangan Narkoba di Nigeria tahun 2009

A. Policy Initiative

Kerjasama pemerintah Amerika Serikat dan Nigeria dalam upaya penanggulangan narkoba memfokuskan pada upaya mengurangi peran sindikat narkoba, meningkatkan profesionalisme lembaga NDLEA dan memperkuat lembaga penegak hukum di Nigeria. *The State Departement Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)* yang merupakan program-program bantuan di Nigeria bekerjasama dengan *Drug Enforcement Agency (DEA)* dan lembaga lainnya yang menangani mengenai narkoba melakukan sebuah upaya untuk memperkuat penegakan hukum di Nigeria. Upaya tersebut dilakukan untuk dapat memperbaiki koordinasi antar lembaga serta merencanakan dan melaksanakan operasi larangan perdagangan narkoba. Pemerintah Amerika Serikat membentuk *The US Coast Guard* untuk memonitoring kawasan perariran terutama untuk menghentikan penyelundupan narkoba melalui jalur laut (INCSR,2009).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan *Policy Initiative* ialah:

- Mengurangi permintaan narkoba melalui pendidikan dan penyuluhan
- Meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga yang berkompeten dalam upaya penanggulangan narkoba di wilayah Amerika Serikat dan Nigeria

- c. Melakukan kerjasama dan pelatihan teknis atau program untuk meminimalisir penyebaran narkoba di kedua negara

Kerjasama dalam upaya penanggulangan narkoba di Nigeria yang sudah dilaksanakan dari tahun 2009, Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan bantuan sekitar \$3 million dalam merencanakan program-program yang telah dibuat oleh kedua negara. Target terpenting dari pemerintah Amerika Serikat adalah memperkuat Unit Polisi Nasional Nigeria (INCSR, 2011). INL dan DEA yang memiliki kantor di Nigeria bekerjasama dengan NDLEA (*Nigerian Drug and Law Enforcement Agency*) untuk meningkatkan kapasitas larangan perdagangan narkoba baik dari jalur laut maupun darat.

B. Airport Control Project (AIRCOP)

Pemerintah Amerika Serikat dan Nigeria bekerjasama dengan UNODC melalui pembentukan program AIRCOP dan CCP. Program ini memfokuskan pada upaya pelarangan melalui wilayah perbatasan darat dan bea cukai. Program ini dibentuk pada Januari 2010 yang memiliki fokus terhadap pelarangan dalam penyebaran heroin, kokain, methamphetamine, dan marijuana (WACD, 2013).

Adapun tujuan dari dibentuknya program ini adalah:

1. Memperkuat operasi dan larangan terutama di bandara internasional
2. Peningkatan pengawasan terhadap kemungkinan terjadi penyelundupan pada penerbangan domestik maupun internasional
3. Memperkuat penyebaran informasi antara bea cukai dan kepolisian

Melalui AIRCOP diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk menjaga keamanan di daerah perbatasan kedua negara. Selain itu, program tersebut juga dijalankan untuk meningkatkan kemampuan lembaga keamanan untuk menangani kekerasan terutama terkait dengan perdagangan narkoba. Pada tahun 2009, DEA telah menerima bantuan dana sebesar USD 6 juta untuk mendukung program ini. Melalui bantuan dana tersebut, Pemerintah Amerika Serikat dan Nigeria mulai memperluas operasinya melalui AIRCOP dalam upaya penanggulangan narkoba. Badan ini juga bertujuan untuk menyelidiki, menekan pertumbuhan geng, serta mengatasi berbagai tindakan kejahatan yang ditimbulkan oleh keberadaan sindikat narkoba. Lembaga inilah yang kemudian menjalankan misinya dalam

melakukan investigasi dan melakukan penyitaan terhadap penyebarluasan yang berasal dari, dapat dilacak, atau dimaksudkan untuk perdagangan narkoba (Nigeria Drug Law Enforcement Agency, 2011).

Program ini menjadi sebuah acuan bagi Pemerintah Amerika Serikat dan Nigeria untuk melakukan kerjasama jangka panjang dan berkelanjutan. AIRCOP merupakan sebuah program yang efektif dalam upaya penanggulangan narkoba pada tahun 2009, karena menasar langsung kepada pemberantasan narkoba melalui jalur udara. Mengingat perdagangan narkoba sebagian besar dilakukan melalui jalur udara. Program inilah yang kemudian menjadi sebuah acuan bagi Pemerintah Amerika Serikat untuk melanjutkan kerjasamanya lebih spesifik melalui WACSI.

4.2 Kerjasama Pemerintah Amerika Serikat dan Nigeria melalui WACSI.

Wadah kerjasama ini menjadi acuan bagi kedua negara dalam upaya penanggulangan narkoba. Langkah awal yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Nigeria adalah memperkuat kerjasama penegakan hukum dan koordinasi kebijakan untuk menjamin keamanan kedua negara. Selain itu, hal lain yang dilakukan adalah meningkatkan upaya untuk mengurangi pengiriman narkoba melalui udara, laut dan darat. Peningkatan kasus terhadap kekerasan yang dilakukan oleh sindikat narkoba, menimbulkan adanya rasa tidak aman dan ancaman bagi pemerintah Amerika Serikat. Untuk itu, diperlukan adanya kerjasama antar kedua negara dalam menanggulangi permasalahan narkoba.

Masing-masing lembaga pemerintah memiliki tugasnya tersendiri. Departemen Luar Negeri mengkoordinasikan semua bantuan Luar Negeri AS untuk mendukung upaya internasional dalam menempur produksi narkoba. *Departement of Defense* (DOD) bertanggung jawab untuk mendeteksi dan memantau dari udara dan maritim mengenai penyebaran narkoba. *Drug Enforcement Administration* (DEA) memimpin koordinasi AS dalam penegakan hukum yang melibatkan produksi internasional, perdagangan, dan penjualan narkoba atau zat terlarang lainnya. Sedangkan *Departement of Homeland Security* (DHS) bertanggung jawab atas keamanan terkait perbatasan dalam penyebarluasan narkoba. Jumlah pendanaan terkait program-program yang akan

dilaksanakan dalam penanggulangan narkoba di Afrika Barat adalah:

Tabel 8. Pendanaan oleh Amerika Serikat melalui program WACSI tahun 2011-2013

Nama Negara	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
Nigeria	USD 20 juta	USD 35.2 juta	USD 60 juta
Benin	USD 5 juta	USD 3.1 juta	USD 3.5 juta
Ghana	USD 3 juta	USD 1.2 juta	USD 0.2 juta
Guinea Bissau	USD 6 Juta	USD 8 juta	USD 8.5 juta
Sinegal	USD 8.1 juta	USD 9 juta	USD 8.5 juta
Togo	USD 11 juta	USD 8.5 juta	USD 9 juta
Total	USD 53.1 juta	USD 65 juta	USD 89.7 juta

Sumber: Congressional Research Service, (2009)

4.3 Implementasi Kerjasama AS dan Nigeria melalui WACSI

4.3.1 Bantuan Keamanan

4.3.1.1 Maritime and Airport Security Assistance.

Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan AFRICOM yang memfokuskan terhadap keamanan maritime dan airport. Pemerintah Amerika Serikat memberikan sebuah pelatihan kepada pasukan Afrika untuk membendung pergerakan sindikat narkoba melalui perairan dan jalur darat. Dalam hal ini Departement Luar Negeri Amerika Serikat meberikan bantuan dana pertama kali dalam jumlah di 2011 sekitar USD 7,5 juta.

Program ini diterapkan dengan tujuan mendisiplinkan kawasan perbatasan dan melakukan sebuah pelatihan bagi pasukan afrika khususnya unit polisi nasional Nigeria. Kawasan bandara yang menjadi perhatian

khusus adalah Abuja Internasional (ABV). Pelatihan diberikan pada unit polisi untuk memperkuat keamanan bandara, menghindari mudahnya mobilisasi narkoba melewati jalur udara. Pemerintah Amerika Serikat melalui DEA memberikan sebuah alat pendeteksi untuk melacak adanya narkoba. Amerika Serikat juga menyumbangkan mesin *full body scanning* untuk di bandara internasional Lagos, Kano, Abuja, dan Port Harcourt sekaligus pelatihan untuk orientasi petugas bandara (NDLEA,n.d). Mesin ini telah terbukti efektif dalam mendeteksi dan menangkap penyelundup kokain dan heroin yang transit di Nigeria. Antara tahun 2008 hingga 2009, lebih dari 12.663 sindikat narkoba ditangkap dengan penyitaan lebih dari 418,8 ton narkoba (NDLEA and Fight Againts Drugs,2008). Pada bulan Juli 2009, sorang wanita ditangkap di bandara internasional Mallam aminu Kano dengan membawa 42 bungkus kokain dengan berat 585 gram yang akan hendak berangkat ke Amerika Serikat. Sindikat narkoba tersebut langsung ditangkap oleh petugas keamanan bandara dan unit polisi Nigeria. Pada tahun 2008, saat kepemimpinan Presiden George Bush mengatakan bahwa ada kemajuan mengenai kerjasama Amerika Serikat dan Nigeria dalam upaya penanggulangan narkoba (Newswatch Magazine,2008).

Nigeria memainkan peran penting dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas keamana di Afrika. Amerika Serikat memberikan sebuah bantuan keamanan yang difokuskan pada peningkatan perdamaian melalui pelatihan bagi unit polisi nasional Nigeria yang bekerjasama juga dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Pemerintah Nigeria berkoordinasi dengan *Departement of Homeland Security, the Federal Aviation Administration, and the International Civil Aviation Organization* untuk memperkuat sistem keamanan. Bantuan lainnya yang diberikan pada bandara internasional adalah '*scanner full body*' (Ploch, 2013). Pada tahun 2011, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merekomendasikan dana sebesar \$2.5 juta pada INCLE untuk memperkuat unit polisi di Nigeria dan aparat penegakan hukum dalam upaya penanggulangan narkoba

4.3.1.2. Memperkuat dan Membangun Unit Polisi.

Nigeria Police Force bekerjasama dengan AFRICOM dalam membangun dan memperkuat institusi dan pengawasan. Hal ini didukung dengan diberlakukannya peraturan

mengenai pembagian zona-zona yang dianggap berbahaya dan berpengaruh dalam perdagangan narkoba. Saat menjalankan tugasnya NPF diawasi oleh suatu badan pengawasan yang disebut dengan *Police Mobile Force*. *Police Mobile Force* merupakan badan pengawas pada kepolisian Nigeria yang dalam tugasnya bekerjasama dengan *the police council, all the governors of the Federating states of Nigeria, the Minister of Interior, the Chairman, Police Service commission and the Inspector-General of Police*.

Pemerintah Amerika Serikat melalui Departement of State melakukan sebuah monitoring setiap tahunnya untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan. Pemerintah Amerika Serikat juga memberikan sebuah pelatihan umum setiap 6 bulan pada unit polisi Nigeria. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan memperkuat hukum dan peradilan di Nigeria agar dapat memperlemah mobilisasi perdagangan narkoba.

Pelatihan ini dilaksanakan di kawasan Lagos dengan jumlah pasukan Nigeria sebesar 68.098 orang (Nigeria Police Force,2009). Pelatihan pada NPF tersebut dilaksanakan pada 19 januari 2011, yang dilaksanakan oleh unit polisi Nigeria dan pasukan kepolisian Amerika Serikat mengenai penggunaan senjata. Saat pelatihan tersebut berjalan, Pemerintah Amerika Serikat secara bersamaan memberikan bantuan penambahan senjata kepada NPF. Bantuan tersebut diberikan karena dengan kondisi minimnya ketersediaan senjata pada saat itu. Bantuan tersebut diharapkan dapat menekan angka kejahatan terorganisir yang beredar di Nigeria terutama dalam hal perdagangan narkoba. Program ini sangat membantu dalam upaya memperluas keamanan terutama di zona-zona yang kerap terjadi transaksi perdagangan narkoba. Pada tahun 2012 tercatat bahwa unit kepolisian Nigeria melakukan sebanyak 80 penyelidikan terkait tindakan kriminal dan perdagangan narkoba (Marshall, 2006). Pemerintah Amerika Serikat memberikan prioritas terhadap Unit Polisi Nigeria untuk mengawasi dan mengontrol terkait upaya penanggulangan narkoba di Nigeria. Upaya tersebut terkait dengan kerjasama memperkuat lembaga untuk menciptakan kerangka hukum sehingga dapat melemahkan kapabilitas dari organisasi atau sindikat narkoba yang tersebar di wilayah tersebut. Pada tahun 2012 hasil penyelidikan NPF terus meningkat. NPF berhasil menangkap sindikat

narkoba yang cukup besar di wilayah kano (Marshall,2006).

4.3.1.3. DEA's Drug Flow Attack Strategy

Operasi ini dirancang untuk membendung dan menekan angka perdagangan narkoba dengan langsung menyerang organisasi sindikat narkoba tersebut. Melalui *West Africa Cooperative Security Initiative* pada tahun 2011, DFAS mendapatkan dana sebesar US \$ 1.600.000 untuk memperluas operasi penyelundupan narkoba. Selain itu, program lainnya yang dijalankan adalah Pelatihan bersama. Pelatihan bersama yang dilakukan oleh pasukan Nigeria yang bekerjasama dengan AFRICOM untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang ada dan memperkuat hubungan kerjasama antar lembaga keamanan Pemerintah Amerika Serikat dan Nigeria.

DFAS dalam pengoperasiannya juga melibatkan *Nigeria Police Force*. Program ini dijalankan dengan memperluas informasi dan pengawasan mengenai keberadaan dari sindikat narkoba. Informasi intelligent ini juga berfungsi untuk melacak keberadaan organisasi kriminal yang transit ataupun menyebarkan narkoba di wilayah Nigeria. Pada tahun 2012 DFAS berhasil membongkar dan menangkap 56 sindikat narkoba yang berada di wilayah Lagos (Mike, 2006). DFAS juga memiliki alat pendeteksi untuk sistem identifikasi yaitu *Fingerprint Identification System*. Alat ini digunakan untuk membantu dalam proses pencarian oknum pelaku tindak kriminal yang terkait dengan perdagangan narkoba.

DEA juga secara aktif mengadakan konferensi tahunan mengenai pelatihan keamanan di wilayah Nigeria. Selain itu, Pemerintah Amerika Serikat melalui IRS Criminal Investigation telah menambahkan anggota aparat keamanan dan meningkatkan pelatihan di wilayah Nigeria untuk memperkuat kerjasama bilateral kedua negara dalam upaya penanggulangan narkoba.

4.3.2 Bantuan Monitoring

4.3.2.1 Detection, Monitoring and Interdiction Operations.

WACSI melalui DOD dalam hal ini bertindak untuk mengumpulkan informasi untuk melakukan mendeteksi para sindikat narkoba terutama di zona transit. Bea Cukai juga melakukan deteksi dan pemantauan

dalam zona transit serta mengambil tindakan langsung terhadap pelaku sindikat narkoba.

Pengaplikasian program ini didukung penuh oleh Departement Keamanan Amerika Serikat salah satunya adalah *Defense Intelligent Agency*. Badan ini memiliki wewenang untuk bertindak, membuat kebijakan serta menugaskan angkatan bersenjata Amerika Serikat untuk melindungi dari bahaya kejahatan transnasional (DEA,2010). *Defense Intelligent Agency* berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Nigeria untuk mengurangi ketersediaan dan penyebaran narkoba.

Amerika Serikat membuat sebuah agenda untuk penanggulangan narkoba di Nigeria melalui WACSI. Agenda utama yang dilakukan adalah mencakup modernisasi hukum, penegakan hukum dan lembaga peradilan dan mengembangkan langkah-langkah anti korupsi. Hal ini yang kemudian menjadi perhatian utama karena dengan penegakan hukum yang lemah di Nigeria mempermudah bisnis perdagangan narkoba di Negara tersebut. Apabila kondisi nasional sudah membaik, lalu agenda selanjutnya yang dilakukan adalah menerapkan sistem pemantauan dan deteksi.

WACSI melalui DOD menyediakan bantuan asing untuk melatih, melengkapi dan meningkatkan kapasitas dalam upaya penanggulangan narkoba. DOD bekerjasama dengan AFRICOM dan *Joint Interagency Task Force-South* (JIATF-South) yang telah berkoordinasi mengenai pemantauan narkoba dan operasi deteksi di zona transit antara Amerika Selatan dan Amerika Serikat (Ward, 2009). Kedua lembaga ini berperan penting dalam upaya deteksi dan monitoring.

4.3.2.2 License Plate Rider

License Plate Rider merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Nigeria untuk mengidentifikasi nomor kendaraan. Teknologi ini berfungsi untuk mengawasi segala hal yang berkaitan dengan pengawasan terutama pengolahan gambar yang berhubungan dengan keamanan jalur darat. LPR merupakan sebuah kamera yang dilengkapi dengan pencahayaan inframerah yang disebut dengan *Optical Character Recognition (OCR)*. Alat ini dipasang oleh DEA di wilayah Lagos, Kano dan Adamawa. Wilayah-wilayah ini dianggap sebagai zona yang sering dilewati oleh sindikat narkoba asal Nigeria ataupun transit di Nigeria. Selain itu, LPR juga bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai nomor kendaraan

yang diduga akan mendistribusikan narkoba ke wilayah tertentu. LPR ini juga di awasi oleh Unit Kepolisian Nigeria untuk memantau pergerakan dari sindikat narkoba.

Pendanaan yang di distribusikan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk LPR ini adalah sekitar USD 1.2 juta (DEA, 2011). Alat ini diawasi oleh Unit Kepolisian Nigeria yang juga akan berwenang dalam menindaklanjuti terhadap sindikat narkoba yang terdeteksi mendistribusikan narkoba ke wilayah Nigeria dan Amerika Serikat. Kerjasama keamanan dalam upaya penanggulangan narkoba di Nigeria memberikan dampak terhadap jumlah penyitaan dan penangkapan pelaku sindikat narkoba di Nigeria. Menurut laporan dari DEA (2012) melalui *Eight Steps to Counter The Drug Trade in West Africa* bahwa 40% narkoba berhasil disita dan melakukan penangkapan 250 pelaku sindikat narkoba yang berasal dari Nigeria, Mexico, Asia melalui pengawasan dari LPR.

Terkait kerjasama yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Nigeria melalui WACSI masih berjalan hingga kini. Program-program yang berjalan bersifat berkelanjutan, dimana disesuaikan dengan kondisi domestik Nigeria. Pemerintah Amerika Serikat dalam upaya penanggulangan narkoba di Nigeria tidak lepas dari peran DEA, AFRICOM, dan NPF. Lembaga-lembaga tersebut bekerjasama untuk memerangi kejahatan perdagangan narkoba yang terjadi di kedua negara.

5. KESIMPULAN

Perdagangan narkoba yang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional kini menjadi tantangan bagi dunia global. Negara-negara di dunia sepakat untuk memerangi perdagangan narkoba ini melalui kerjasama. Hal ini tercantum pada *United Nations against illicit Traffic in Narcotic Drug and Pyscotropic Substance* (1988) mengenai respon negara-negara di dunia terhadap ancaman perdagangan narkoba.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh suatu negara adalah melalui kerjasama bilateral. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara mengacu terhadap *President Determination* oleh Barack Obama yang menyatakan bahwa Nigeria merupakan salah satu negara yang menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan narkoba. Kerjasama bilateral dalam upaya penanggulangan perdagangan narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat

dan Nigeria melalui *West Africa Cooperative Security Initiative (WACSI)* melibatkan lembaga-lembaga lainnya seperti *Drug Enforcement Administration, Departments of Justice, Departement of Defense, Departement of State, Department of Treasury, Departement of Transportation, AFRICOM, Unit Polisi Nasional Nigeria, dan Nigeria Drug Law Enforcement Agency (NDLEA)*. Lembaga-lembaga inilah yang ikut serta dalam upaya pengendalian narkoba di Nigeria.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abadinsky, Howard. 2012. *Organized Crime*. Belmont: Cengage Learning.

Liddick, Don. 2004. *The Global Underworld: Transnational Crime and United States*. Westport: Praeger Publisher.

<http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ni> (diakses 11 Juni 2014)

Wyler, L.S dan Cook, N. 2009. *Illegal Drugs Trade in Africa: Trend and US Policy*. Washiton DC: Congressional Research Service.

Bouchat, J. 2013. *The Cause of Instability in Nigeria and Implication for United Sates*. United Sates: Strategic Studies Institute.

Foldvary, F.E. 2013. *The Foreign Economic Effect of The US War on Drugs*. Jurnal ouregon.

Raphael, S dan Stokes, D. 2011. *Globalizing West African Oil US Energy Security and Global Economy*. Jurnal International Affairs.

Buzan, Barry. 1994. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. United States: ECPR Press.

<http://www.ibtimes.com/fake-charities-drug-cartels-ransom-extortion-where-islamist-group-boko-haram-gets-its-cash-1585743> (diakses 11 Juni 2014)

Hagan, F. (2006) . *Organized crime and organized crime: indeterminate problems of definition*. Trends in organized crime, 9 (4) 127-137;

Hargrove, E. (1975). *The missing-link: the study of the implementation of social*

policy. Washington: The urban institute

Harrigan, T.(2012), *Statement of the Honorable Thomas Harrigan Deputy Administrator Drug Enforcement Administration Before The Senate Caucus On International Narcotics Control United States Senate Regarding Countering Narcotics Threats In West Africa*.

James D. Fearon and David D. Laitin (2003). *Ethnicity, Insurgency, and Civil War*, American Political Science Review

James O, F. (2000). *Meeting the challenge of transnational crime, National institute of justice journal*, pp. 3 dapat diakses pada ncjrs.org/pdffiles1/jr000244b.pdf

Jack C.P., Roy O. (1969). *Internasional relation dictionary*, Holt and Winston, New York, hal 89

Lane, J.E. (1983). *Concept of Implementation. Creating the University of Norrland:Goals, Structurs and Outcomes*. Umeå: Liber (USPA,7)

Liddick, D. (2004). *The global underworld: Transnational crime and United States*. Westport: praeger publisher.

Mardalis, (2002). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta, Bumi Askara.

Raphael, S., Stokes, D. (2011). *Globalizing West African oil US energy security and global economy*. Jurnal international affairs.

Sufri Yusuf, (1989). *Hubungan Internasional & Politik Luar Negeri*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 10.

Undang-Undang No 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nat. Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)*, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi

Wyler, L.S., Cook, N. (2009). *Illegal drugs trade in Africa: Trend and US policy*. Washiton DC: Congressional Research Service.

Nigeria. (n.d.). *About Nigeria*. Diakses pada 11 Juni 2014 dari <http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ni>

Nigeria. (n.d.). *About Nigeria*. Diakses pada 11 Juni 2014 dari <http://www.ibtimes.com/fake-charities-drug-cartels-ransom-extortion-where-islamist-group-boko-haram-gets-its-cash-1585743>

Transnational organized crime. (n.d.). Diakses pada 12 Juni 2014 dari [http://www.lpsk.go.id/upload/LPSK_Buletin%20Kesaksian%20\(single\)_rev07_13092012.pdf](http://www.lpsk.go.id/upload/LPSK_Buletin%20Kesaksian%20(single)_rev07_13092012.pdf)

Mexico and the United States: Neighbors Confront Drug Trafficking. Diakses pada 25 Januari 2015 dari <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/218561.pdf>

Refocusing U.S.- Mexico Security Cooperation. (2012). Diakses pada 25 Januari 2015 dari <http://www.cfr.org/mexico/refocusing-us-mexico-security-cooperation/p29595>